

## **BAB IV**

### **KETERTARIKAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PARTAI GOLKAR**

#### **4.1 Profil Partai Golkar**

##### **4.1.1 Sejarah Partai Golkar Kota Tangerang Selatan**

Partai GOLKAR dengan dinamikanya selalu memiliki posisi tersendiri dalam perpolitikan di Indonesia. Partai GOLKAR yang hingga saat penelitian ini dilakukan merupakan partai besar dan masih menempati posisi teratas partai politik di Indonesia. Partai GOLKAR sendiri bukanlah satu-satunya partai yang bertahan sejak masa Orde Baru, melainkan juga terdapat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Namun, untuk tetap bisa berada di jajaran partai teratas merupakan prestasi tersendiri yang dimiliki Partai GOLKAR.

Partai Golongan Karya (Golkar) merupakan partai yang masih menunjukkan eksistensinya di usianya yang menginjak 50 tahun sejak partai ini berdiri. Pasca reformasi 1998, Partai Golkar berhasil melepaskan beban sejarah yang melekat di tubuh partainya, setelah Ketua Umum Partai Golkar mengumumkan bahwa partai ini berusaha untuk terlepas dari orde baru. Terbukti bahwa partai ini masih mempertahankan eksistensinya, pada Pemilu 1999 Partai Golkar berhasil duduk di peringkat kedua. Meskipun, Partai Golkar pernah dibekukan pada rezim Abdurrahman Wahid melalui Dekrit Presiden tetapi itu semua dapat dilaluinya malah Golkar menjadi pemenang dalam Pemilu 2004.<sup>32</sup>

Kemudian muncul sosok kekuatan sipil yang mulai menguat dalam tubuh Partai Golkar, berbeda dengan sebelumnya, Golkar sangat identik dengan figur militer. Terbukti dengan terpilihnya Akbar Tandjung secara demokratis pada Munas Golkar tahun 1999, mengalahkan Edi Sudrajat sebagai figur dari militer yang menjadi awal kebangkitan politisi sipil dalam tubuh Golkar. Terpilihnya

---

<sup>32</sup> Bestian Nainggolan, et.al., Kompaspedia: Partai Politik Indonesia 1999-2019: Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016), h. 113.

Akbar Tandjung memberikan sedikit perubahan pada struktur kepengurusannya yang mana melibatkan kalangan dari politisi sipil. Selain itu, Akbar Tandjung juga membuat konsep baru terkait visi dan misi Partai Golkar untuk kedepannya yaitu menjadi partai politik yang terbuka, demokratis, moderat, mandiri, solid, dan mengakar serta responsif terhadap berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, bangsa atau negara ini.<sup>33</sup>

Hal ini berbeda jika dibandingkan pada era akhir orde baru, terpilihnya Harmoko yang berasal dari kalangan sipil dianggap masih berada dalam bayang-bayang kekuasaan Presiden Soeharto pada saat itu. Terpilihnya Akbar Tandjung, yang kemudian dilanjutkan pada kepemimpinan Jusuf Kalla dan Abdurizal Bakrie, menjadi gambaran bahwa Partai Golkar berupaya melepaskan beban sejarahnya.<sup>34</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Partai Golkar pasca era reformasi untuk mempertahankan ekistensi partai ini terbukti dengan mengakar kuatnya dukungan basis massa, tidak hanya dikalangan bawah saja tetapi juga menancap kokoh di kalangan elit politiknya. Karakter politik yang pragmatis ditambah dengan kekuatan modal yang besar sehingga mendukung tubuh partai ini membuat Partai Golkar sebagai perusahaan terbuka yang menjadi lahan pertarungan kekuatan politik yang mempunyai modal yang besar. Kemunculan 2 tokoh pengusaha nasional dalam kepemimpinan Partai Golkar, yakni Jusuf Kalla periode 2004-2009 dan Abdurizal Bakrie periode 2009-2014 membuat partai ini semakin menjadi kekuatan politik yang banyak dibangun dengan modal yang besar.<sup>35</sup>

Terbentuknya Partai Golkar Kota Tangerang Selatan bersamaan dengan berdirinya Kota Tangerang Selatan yang berasal dari hasil pemekaran Kabupaten Tangerang. Terbentuknya Kota Tangerang Selatan mendorong terbentuknya

---

<sup>33</sup> Bachtiar Effendy, et.al., *Beringin Membangun Sejarah Partai Golkar*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2012), h. 145.

<sup>34</sup> Bestian Nainggolan, et.al., *Kompaspedia: Partai Politik Indonesia 1999-2019: Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016), h.115.

<sup>35</sup> Bestian Nainggolan, et.al., *Kompaspedia: Partai Politik Indonesia 1999-2019: Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016), h.116.

kepengurusan partai, karena partai merupakan bagian dari instrumen politik yang tidak bisa lepas dari persoalan pemerintahan.<sup>36</sup>

Setelah Kota Tangerang Selatan itu terbentuk kemudian dibuatlah apa yang disebut karteker. Karteker adalah pelaksana tugas (Plt) yang bertugas melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) untuk membentuk kepentingan definitif. Setelah itu, terpilihlah ketua DPD yang pertama yaitu Muhammad Kanung lalu kemudian digantikan oleh Airin Rachmi Diany sampai saat ini.

Dalam masa kepemimpinan yang pertama, terdapat masalah internal pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sehingga program-program dari Partai Golkar Tangsel selama 2 tahun itu terhenti oleh keputusan UndangUndang yang berlaku atau dapat dikatakan vakum kepemimpinan selama 2 tahun. Pada saat itu juga, Airin Rachmi Diany dapat dikatakan menggantikan posisi Muhammad Kanung sebagai Ketua DPD meskipun dengan jabatan Pergantian Antar Waktu (PAW) karena Muhammad Kanung ini meninggal dunia pada masa jabatannya.<sup>37</sup>

Demikianlah sekilas dari rentang sejarah Partai Golkar Kota Tangerang Selatan mengingat umur Kota Tangerang Selatan baru menginjak usia 10 tahun. Di usia tersebut masih terbilang cukup muda dalam persoalan pemerintahan, sehingga secara jabatan ketua partainya baru dua kali masa kepemimpinan. Di masa yang akan datang, mungkin akan ada tokoh baru yang muncul atau tetap dipimpin oleh Airin Rachmi Diany.

Mengingat partai Golkar itu sangat dinamis, demokratis dan juga fleksibel, artinya di Golkar siapapun bisa jadi ketua sepanjang mampu dan bisa diterima oleh akar rumput (grass-roots). Tidak memperhatikan latar belakang status sosial, suku, ras, agama, bahasa, dan lainnya. Terlihat pada kebanyakan para pendahulunya yang berasal dari orang-orang Timur seperti Aburizal Bakrie, Akbar Tanjung dan Jusuf Kalla.<sup>38</sup> Tidak menutup kemungkinan bahwa siapa saja dapat menjadi ketua partainya.

---

<sup>36</sup> Aminudin (Pengurus Partai Golkar Kota Tangerang Selatan), diwawancarai pada tanggal 16 Mei 2022, Pamulang, Tangerang Selatan.

<sup>37</sup> Daffa Fajriansyah, Sarjana Ilmu Hukum, diwawancarai oleh Rosihan Alam Tarmiji H, pada 12 April 2023, Ciputat Tangerang Selatan.

<sup>38</sup> Aminudin (Pengurus Partai Golkar Kota Tangerang Selatan), diwawancarai pada tanggal 16 Mei 2022, Pamulang, Tangerang Selatan.

Awalnya letak kantor Partai Golkar Tangerang Selatan berada di Villa Bintaro yang memiliki anggota yang jumlahnya ribuan. Adapula kader yang tercatat memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dan adapula yang sifatnya hanya simpatisan saja. Simpatisan Golkar itu tidak pernah hilang artinya meskipun tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) tetapi ia simpati dengan Partai Golkar karena mereka tahu rentang sejarah dan para pendahulu Golkar yang cukup cakap dalam kepemimpinannya dan memiliki kemampuan yang mumpuni.

#### **4.1.2 Tujuan, Visi dan Misi Partai Golkar**

Tujuan dibentuknya partai Golkar Tangerang Selatan adalah sama tujuan awal karena daerah lokal seperti Tangerang Selatan berangkat dari hulu pusat, Golkar itu lahir dengan sistem politik yang dimiliki, bagian dari instrumen politik maupun pemerintah sudah membuktikan terlepas dari lebih kurangnya Partai Golkar dibuktikan selama 32 tahun di bawah kepemimpinan Soeharto banyak yang didapatkan manfaatnya memang tidak sedikit pula dampak negatifnya. Oleh karena itu, pro-kontra yang terjadi baik di internal maupun eksternal merupakan suatu hal yang wajar karena di dunia ini tidak ada yang sempurna karena itu semua bagian dari sebuah dinamika.<sup>39</sup> Tujuan dibentuknya partai Golkar adalah:

1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menghormati dan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan hukum dan hak azasi manusia.

---

<sup>39</sup> Aminudin (Pengurus Partai Golkar Kota Tangerang Selatan), diwawancarai pada tanggal 16 Mei 2022, Pamulang, Tangerang Selatan.

Dalam sebuah penelitian dijelaskan bahwa pembentukan Partai Golkar awalnya adalah terdiri dari gabungan organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti kino, seperjuangan yang sama-sama merumuskan mencegah bahaya latin dan pengaruh-pengaruh atau paham-paham komunis. Meskipun Partai Golkar Tangerang Selatan memiliki kiprah yang sangat bagus, tidak terlepas dari kendala seperti black campaign, saling menjatuhkan lawan dan lebih kepada masalah dari luar (eksternal). Tetapi, tidak menutup kemungkinan di internal pun juga ada, namun hanya terjadi gesekan kepentingan saja yang disebabkan oleh sesama anggota yang tidak mendapatkan posisi atau mungkin tidak diakomodirnya kepentingan mereka sehingga para elit tersebut mengeluarkan statement-statement yang terkadang pada akhirnya membuat masyarakat menjadi bingung.<sup>40</sup>

Adapun program kerja dari Partai Golkar Kota Tangerang Selatan yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Walikota karena Walikota Tangerang Selatan adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Tangerang Selatan. Visi dan misi dari Partai Golkar Kota Tangerang Selatan itu adalah membangun Kota Tangerang Selatan mulai dari infrastruktur sampai pembangunan sumber daya manusia artinya keberadaan Partai Golkar Kota Tangerang Selatan paling tidak harus bermanfaat bagi masyarakat Tangerang Selatan.<sup>41</sup> Adapun visi dan misi partai Golkar adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

### **1. Visi**

“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia.”

Paradigma Baru Partai Golkar ini berisi pokok-pokok doktrin, visi, misi, dan platform politik. Di dalam perumusan Paradigma Baru ini ada terkandung aspek pembaruan sekaligus kesinambungan. Aspek pembaruan ditunjukkan

---

<sup>40</sup> Indah, h. 44.

<sup>41</sup> Daffa Fajriansyah, Sarjana Ilmu Hukum, diwawancarai oleh Rosihan Alam Tarmiji H, pada 12 April 2023, Ciputat Tangerang Selatan.

<sup>42</sup> <https://www.partaigolkar.com/visi-dan-misi/>.

melalui perubahan struktur atau kelembagaan, dan aspek kesinambungan tampak pada kekukuhan Partai Golkar untuk tetap berideologi Pancasila dan doktrin karya dan karya.

Pembaharuan ini disamping dimaksudkan untuk meluruskan sejumlah kekeliruan lama, juga diarahkan untuk mewujudkan Partai GOLKAR yang mandiri, demokratis, kuat soild, berakar, dan responsif. Dengan Paradigma Baru maka Partai GOLKAR diharapkan menjadi partai politik yang modern dalam pengertiannya yang sebenarnya. Yakni, tidak lagi sebagai “Partainya Penguasa” (the ruler’s party) yang hanya menjadi mesin pemilu atau alat politik untuk melegitimasi kekuasaan.

Pembaruan paradigma itu sendiri didorong oleh faktor utama yang berasal dari diri Partai Golkar sendiri, yakni jatidiri dan watak GOLKAR sebagai kekuatan pembaru. Sebagaimana disebutkan pada point keempat dari “Ikrar Panca Bhakti Golongan Karya”, etos atau semangat pembaruan pada sejatinya merupakan fitrah atau sikap dasar Partai Golkar sejak kelahirannya. Fitrah inilah yang mendorong dilakukannya pembaruan ini. Dengan demikian, pembaruan paradigma ini merupakan pengejawantahan belaka dari fitrah tersebut.

Paradigma Baru Partai Golkar ini telah mulai diwujudkan melalui pembaruan internal, terutama terhadap struktur atau kelembagaan organisasi yang selama ini mempunyai akses yang terlalu besar terhadap organisasi yang membatasi kemandirian Partai Golkar.

## **2. Misi**

- 1) Menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan mengjormati hak azasi manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.

- 3) Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis.

#### **4.2 Supporting Partai**

Dalam sebuah partai politik yang besar, dengan tujuan yang perlu dicapai dalam skala luas perlunya pembantu dalam hal-hal tertentu pada tiap daerah untuk memenuhi tujuan pada setiap belahan daerah yang dituju. Terlebih di Indonesia dengan skala jumlah masyarakat dan wilayah yang sangat luas, tentu Partai Golkar memerlukan bantuan berupa sayap partai yang dibentuk untuk membantu tugas. Beberapa sayap partai yang membantu dan berkembang karena merekrut anggota dari semua kalangan, terlebih para milenial. Adapun milenial yang ikut serta dalam partisipan politik di partai Golkar di Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

##### **1. AMPG**

Angkatan Muda Partai Golongan Karya adalah organisasi sayap bagi pemuda yang terintegrasi dengan Partai Golkar. Di bandingkan organisasi atau partai sayap lain, AMPG adalah salah satu wadah yang sangat cocok bagi kaum milenial untuk berdaya guna dalam perjalanan politik anak muda. Maka di Tangerang Selatan misalnya, adalah salah satu Kota baru yang memerlukan pergerakan anak muda, oleh karena itu, Partai Politik yang memberikan wadah bagi milenial adalah Partai Golkar.

Visi: Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia.

Misi: Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia.

## 2. SOKSI

Soksi adalah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia. Sekitar tahun 1960-an, keberadaan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengalami berbagai cobaan terutama dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan *ondderbouw*-nya. Sayap organisasi dibawah PKI itu seperti SOBSI, Pemuda Rakyat, Gerwani, Lekra, dan Corps Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI). Oleh karena kondisi itu, SOKSI lahir tepatnya pada 20 Mei 1960 sebagai panggilan sejarah untuk membela Pancasila, UUD 1945, dan keutuhan NKRI. Saat didirikan nama SOKSI memiliki kepanjangan dari Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia.<sup>43</sup>

Pawa awalnya nama dan embrio SOKSI adalah Badan Pusat Koordinasi Perusahaan-perusahaan Negara (BPKPN). Saat itu pendiri SOKSI, Suhardiman menjabat sebagai Sekertaras BANAS (Badan Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda) dan ditugaskan oleh negara untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing.

Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau disingkat SOKSI adalah organisasi kemasyarakatan yang basis utama awalnya adalah golongan buruh atau pekerja seluruh Indonesia yang didirikan pihak militer untuk mengimbangi keberadaan SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) yang berhaluan Komunis dan merupakan underbownya PKI (Partai Komunis Indonesia) dalam gerakan buruh.

Dalam Sejarah kelahiran SOKSI, ada beberapa momentum yang memiliki nilai sangat tinggi, yang sangat menentukan langkah dan strategi perjuangan organisasi. Momentum-momentum tersebut adalah:<sup>44</sup>

- Kehidupan politik di tanah air setelah pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1955 yang pertama kali dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, khususnya pada situasi periode 1957 sampai dengan 1965 sangat tidak menguntungkan bagi struktural

---

<sup>43</sup> <https://www.partaigolkar.com/sentral-organisasi-karyawan-swadiri-indonesia/>.

<sup>44</sup> <https://www.soksi.web.id/sejarah-soksi.php>.

politik, sosial, budaya, dan perekonomian Bangsa Indonesia. Berbagai gejolak sosial politik yang bersifat kedaerahan seperti PRRI, dan PERMESTA, adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses mencari bentuk sistem kehidupan politik, sosial, budaya, dan perekonomian Bangsa Indonesia.

- Berbagai keputusan politik yang sangat startegis telah pula dikeluarkan oleh pemerintah Bung Karno pada tahun 1957 sampai dengan 1959, antara lain; Perjuangan pembebasan Irian Barat, Pembatalan Konfrensi Meja Bundar, ambil alih / Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan milik Belanda, dan Dekrit Presiden tanggal, 5 Juli 1959; Konstituante dibubarkan, dan Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali sebagai landasan Konstistusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem politik Liberal ditinggalkan, dan dimulai sistem politik yang dikenal dengan Demokrasi Terpimpin.
- Pada Tahun 1957, Badan Nasionalisasi (BANAS) dibentuk untuk melaksanakan ambil alih, atau Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda, dengan Ketua Harian BANAS Bapak D. Suprayogi (Mayjen), dan Bapak Suhardiman (Kapten-TNI-AD) sebagai Sekretaris BANAS.
- Sebagai Sekretaris BANAS, Bapak Suhardiman berbekalkan naluri kejuangan, dan keyakinan yang kuat serta dari pengamatan, mempelajari, dan mengkaji permasalahan yang dihadapi Bangsa Indonesia selama tiga tahun (1957-1960), maka dari Ide Dasar “Manusia Karya” sebagai perwujudan dari “Manusia Indonesia Baru” disampaikan kepada Ketua Harian BANAS, dan sekaligus mengusulkan agar dibentuknya PERSATUAN KARYAWAN PERUSAHAAN NEGARA, bahwa dengan konsep ini akan mampu mengimbangi, dan menandingi PKI, serta seluruh jajarannya.

- Tanggal, 20 Mei 1960: ketua Harian BANAS menyampaikan Ide Dasar tentang Karyawan, atau Manusia Karya Swadiri (Karyawan Swadiri) yang diusulkan oleh Bapak Suhardiman tersebut pada sidang Kabinet, sekaligus persiapan dibentuknya organisasi PERSATUAN KARYAWAN PERUSAHAAN NEGARA (PKPN) yang kemudian diperingati sebagai hari kelahiran SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia).
- Kehadiran Organisasi PKPN dengan cepat menyebar diperusahaan-perusahaan negara diseluruh wilayah Indonesia, dan sekaligus telah menggelisahkan PKI karena mengancam keberadaannya. PKI melakukan protes melalui berbagai media-masa atas kehadiran PKPN.
- Untuk menindaklanjuti perkembangan PKPN, maka pada pertengahan tahun 1961 diadakan rapat pleno seluruh pimpinan PKPN, dan menghasilkan keputusan untuk mendirikan; Badan Koordinasi Pusat Persatuan Karyawan Perusahaan Negara (BKPPKPN), dengan Ketua Umum, Suhardiman, dan Sekretaris Jenderal, Adolf Rachman.
- Tanggal, 21 September 1962: Musyawarah Kerja Nasional I BKPPKPN (Badan Koordinasi Pusat Persatuan Karyawan Perusahaan Negara) yang diselenggarakan di Palembang, khususnya komisi organisasi tidak berhasil memutuskan apa nama yang tepat bagi organisasi kedepan, karena nama BKPPKPN dianggap tidak mencerminkan ciri, dan misi yang jelas. Sebagai Ketua Umum BKPPKPN Bapak Suhardiman mengusulkan nama SOKSI (SENTRAL ORGANISASI KARYAWAN SOSIALIS INDONESIA), maka Mukernas I BKPPKPN menerima usul tersebut, dan bersepakat nama BKPPKPN diganti menjadi SOKSI sebagai nama, sekaligus Jati Diri bagi perjuangan Karyawan Indonesia. Kalimat SOSIALIS mengandung pengertian SOSIALISME PANCASILA yang bercirikan Manusia Karya yang mandiri, dan sejahtera.

Pada 2 Desember 1962, PKI memunculkan isu Angkatan Kelima yaitu untuk mempersenjatai Petani dan Buruh. Gagasan PKI ini ditentang keras oleh SOKSI dan TNI AD. Desember 1962, Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani merestui pembentukan Persatuan Karyawan Perusahaan Negara (PKPN) dan mendukung Organisasi ini kemudian berubah nama menjadi Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI) yang dipimpin Mayor (Inf) Suhardiman. Restu dan dukungan tersebut merupakan salah satu bentuk langkah terbuka dari Jenderal Yani dalam membendung pengaruh PKI yang memiliki Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Pada 17-22 Desember 1962: Musyawarah Besar (MUBES) I BKPPKPN, atau disebut juga sebagai MUBES I SOKSI di Gelora Bung Karno, Jakarta yang menghasilkan legitimasi bagi keberadaan organisasi SOKSI secara Nasional. Amanat Presiden Soekarno pada MUBES I SOKSI secara politis benar-benar telah memberikan arti khusus, dan legalitas bagi keberadaan BKPPKPN sebagai embrio SOKSI secara Nasional.<sup>45</sup>

## **2. Kosgoro 57**

Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong yang berdiri pada tanggal 10 November 1957. Kosgoro merupakan salah satu KINO (Kelompok Induk Organisasi), disamping SOKSI dan MKGR, yang melahirkan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada 20 Oktober 1964. Kino-kino tersebut pada tahun 1970 mengeluarkan keputusan bersama untuk ikut menjadi peserta pemilihan umum melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (Golkar). Logo yang menjadi tanda gambar Golkar sejak Pemilu tersebut tetap dipertahankan hingga sekarang.<sup>46</sup>

Kosgoro didirikan oleh Mas Isman (Ayah dari Hayono Isman/ Ex Menpora RI), Mas Isman adalah Ex Komandan pejuang Tentara Pelajar Jawa Timur/ TRIP, Kosgoro memiliki semboyan Tri Dharma yaitu: Pengabdian, Kerakyatan dan Solidaritas. Kosgoro sebagai Induk Organisasi memiliki gerakan, badan, dan lembaga yang merupakan alat kelengkapan organisasi, yang terdiri dari: Gerakan

<sup>45</sup> <https://www.soksi.web.id/sejarah-soksi.php>.

<sup>46</sup> <https://www.partaigolkar.com/kesatuan-organisasi-serbaguna-gotong-royong/>

Mahasiswa Kosgoro (Gema Kosgoro), Generasi Muda Kosgoro (GM Kosgoro), Badan Musyawarah Pengusaha Swasta (Bamuhas), Wanita Kosgoro, dan Lembaga Bantuan Penyuluhan Hukum Kosgoro (LBPH Kosgoro).<sup>47</sup>

### 3. KPPG

Partai Golkar merupakan partai besar di Indonesia senantiasa melakukan penguatan kader dari berbagai lini. Tidak terkecuali untuk basis kader pemuda dan perempuan. Karenanya, pada tahun 2002, melalui RAPIMNAS ke-V Partai Golkar, lahir gagasan untuk membentuk organisasi sayap pemuda dan perempuan, guna mendukung kerja-kerja politik di lapangan. Sayap partai ini dipimpin oleh perempuan bernama Airin Rachmi Diany.

Langkah ini juga sebagai upaya konsolidasi dan optimalisasi potensi dan kekuatan kader sayap partai, untuk perluasan dan perekrutan basis massa. Mengingat kondisi eksternal yang berlaku pada saat itu, yakni Undang-undang Ormas nomor 8 tahun 1985 menegaskan bahwa ormas tidak bisa bernaung di bawah partai politik dan tidak diperbolehkan memberi dukungan kepada partai politik, maka sangat dibutuhkan organisasi sayap (internal) Partai Golkar.<sup>48</sup>

Surat Keputusan Nomor: I/RAPIM-V/GOLKAR/2002 Tanggal 8 Februari 2002, menjadi penegasan resmi tentang kebijakan pembentukan organisasi sayap Partai Golkar, di bidang pemuda dan perempuan. Dengan keputusan ini, kedudukan organisasi sayap pemuda dan perempuan menjadi bagian struktur internal partai, yang bersifat instruktif, dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Partai Golkar. Menindaklanjuti surat keputusan tersebut, proses dan tahapan pembentukan pun dijalankan, 26 Maret 2002, diinisiasi Ketua Korbid Perempuan DPP Partai Golkar kala itu, dilakukan pertemuan para tokoh perempuan yang kemudian menghasilkan kesepakatan untuk membentuk wadah perempuan Partai Golkar. 22-23 Mei 2002, digelar Rapat Kerja Nasional Bidang Perempuan, dengan peserta seluruh Ketua Bidang Perempuan Partai Golkar

---

<sup>47</sup> <https://www.partaigolkar.com/kesatuan-organisasi-serbaguna-gotong-royong/>.

<sup>48</sup> <https://www.partaigolkar.com/kesatuan-perempuan-partai-golkar/>.

Provinsi dan Pimpinan Ormas Perempuan, yang menghasilkan 7 (Tujuh) Prinsip Pembentukan Organisasi:<sup>49</sup>

Pertama: Organisasi Sayap Perempuan Partai Golkar dituntut untuk berperan aktif dalam menjawab permasalahan dan tantangan serta melaksanakan seluruh program Partai Golkar sebagai upaya untuk menyikapi kondisi yang ada serta mengembangkan perjuangan Partai Golkar sesuai dengan Paradigma Baru Partai Golkar ke depan.

Kedua: Sebagai bagian dari Partai Golkar, Organisasi Sayap Perempuan Partai Golkar dituntut untuk memperkuat gerakannya dalam rangka penggalangan massa kelompok strategis perempuan sebagai kekuatan yang cukup besar dan potensial untuk memainkan peranannya dan melakukan kegiatan – kegiatan dalam membersarkan dan memajukan Partai Golkar.

Ketiga: Organisasi Sayap Perempuan Partai Golkar disebut nama “Kesatuan Perempuan Partai Golkar” dan berkedudukan pada seluruh jajaran Kepengurusan Partai Golkar di tingkat pusat sampai ke Tingkat Kelurahan/ Desa. Sesuai kebijakan DPP Partai Golkar, untuk pertama kalinya Ketua Umum Perempuan Partai Golkar dijabat oleh Ketua Korbis Sosial dan Pemberdayaan Perempuan DPP Partai Golkar.

Keempat: Segera setelah pendeklarasian Perempuan Partai Golkar harus ada komitmen dan penegasan Partai Golkar bahwa Organisasi Sayap Perempuan Partai Golkar merupakan sumber rekrutmen kader perempuan Partai Golkar ke depan.

Kelima: Pembentukan Organisasi Sayap Perempuan Partai Golkar, merupakan momentum penting untuk melaksanakan perubahan secara menyeluruh terhadap struktur Partai Golkar dalam rangka menyikapi dan mengikuti tuntutan perjuangan Partai Golkar. Partai Golkar dituntut untuk secara sungguh – sungguh memberikan perhatian dan kesempatan bagi anggota / kader perempuan Partai Golkar, sesuai semangat reformasi yang menekankan pada unsur – unsur persamaan dan keadilan.

---

<sup>49</sup> <https://www.partaigolkar.com/kesatuan-perempuan-partai-golkar/>.

Keenam: Pembentukan Organisasi Sayap Perempuan Partai Golkar merupakan komitmen dan penegasan Partai Golkar untuk meningkatkan kedudukan dan partisipasi kader perempuan Partai Golkar pada posisi – posisi strategis di partai maupun pada lembaga – lembaga politik lainnya.

Ketujuh: Dalam waktu selambat–lambatnya 8 (delapan) bulan ke depan mempersiapkan Organisasi Sayap Perempuan Partai Golkar di daerah. Dalam rangka koordinasi dan konsolidasi kepengurusan serta program kerja, maka selambat–lambatnya 1 (satu) tahun setelah pendeklarasian Organisasi sayap Perempuan Partai Golkar, diadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Organisasi sayap Perempuan Partai Golkar. 23 Mei 2002, Melalui Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: KEP-264/DPP/GOLKAR/V/2002 Kesatuan Perempuan Partai Golkar, KPPG, di deklarasikan, dengan dihadiri oleh 165 orang peserta dari organisasi perempuan tingkat nasional. Dan melalui Surat Keputusan Nomor : Kep-265/DPP/GOLKAR/V/2002 Tanggal: 23 Mei 2002 Tentang Komposisi dan Personalia Pimpinan Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar ditetapkan kepengurusan pertama PP KPPG.

#### **4. MKGR**

Dengan disertai upaya rokhaniah untuk mendekatkan diri, mohon petunjuk, taufik dan hidayah dari Allah Swt maka ada di antara kelompok massa rakyat dengan dipimpin oleh seorang yang mereka tuakan; Kolonel INF. R.H. Sugandhi Kartosubroto mendirikan organisasi massa yang diberi nama Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong disingkat MKGR pada tanggal 3 Januari 1960 di Jakarta. MKGR lahir dari kalangan rakyat tanpa modal kekayaan dan tidak bermandikan fasilitas dan berselimutkan kekebalan. MKGR lahir dalam keadaan lemah seperti layaknya anak manusia yang lahir di tengah hutan belantara. Ia kemudian hidup dan menghidupi diri dengan bersandar pada rahmat Illahi dan kecintaan insani serta bekal cita-cita luhur. Ternyata kemudian MKGR secara berangsur tetapi pasti tumbuh, berkembang dan berbuah yang akhirnya membawa kemanfaatan yang tidak kecil.

Visi dan Misi Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) adalah organisasi massa yang hidup di tengah rakyat, milik rakyat, oleh rakyat dan untuk

rakyat, bersifat terbuka tanpa membeda bedakan suku, ras, agama, golongan dan menentang ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berusaha menegakkan nilai-nilai kemanusiaan (hak asasi manusia), dan demokratisasi, serta menentang segala bentuk pemerasan, penindasan dan kekerasan.

### **4.3 Struktur Demografi Kota Tangerang Selatan**

#### **4.3.1 Partai di Kota Tangerang Selatan**

Partai yang ada di Kota Tangerang Selatan dapat diketahui dari data jumlah perolehan suara pada pemilu tahun 2019 lalu.

- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
- Golongan Karya (Golkar)
- Nasional Demokrat (Nasdem)
- Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
- Partai Beringin Karya dan Partai Nasional Republik (Berkarya)
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- Partai Amanat Nasional (PAN)
- Hati Nurani Rakyat (Hanura)
- Partai Demokrat
- Partai Bulan Bintang (PBB)
- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

### 4.3.2 Demografis Penduduk

KECAMATAN	2017	2018	2019
Setu	86.783	89.825	92.890
Serpong	184.761	191.968	199.283
Pamulang	350.923	359.810	368.603
Ciputat	239.152	245.727	252.262
Ciputat Timur	211.003	215.186	219.261
Pondok Aren	392.284	405.316	418.420
Serpong Utara	179.993	188.476	197.187
<b>Kota Tangerang Selatan</b>	<b>1.644.899</b>	<b>1.696.308</b>	<b>1.747.906</b>

Sumber: <https://tangselkota.bps.go.id/indicator/12/85/1/jumlah-penduduk.html>.

Namun adanya perubahan data sebanyak 0,68% pada tahun 2022.

NO	NAMA KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	SERPONG	78.908	79.803	158.711
2	SERPONG UTARA	67.875	68.049	135.924
3	PONDOK AREN	145.222	145.543	290.765
4	CIPUTAT	108.708	108.473	217.181
5	CIPUTAT TIMUR	83.328	84.600	167.928
6	PAMULANG	158.749	159.018	317.767
7	SETU	44.538	43.920	88.458
<b>TOTAL</b>		<b>687.328</b>	<b>689.406</b>	<b>1.376.734</b>

Sumber: <https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/uploads/demografi/KESELURUHAN1662371785401.pdf>.

**Jumlah Penduduk di Kota Tangerang Selatan berdasarkan jenis kelamin**

NO	NAMA KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	SERPONG	78.908	79.803	158.711
2	SERPONG UTARA	67.875	68.049	135.924
3	PONDOK AREN	145.222	145.543	290.765
4	CIPUTAT	108.708	108.473	217.181
5	CIPUTAT TIMUR	83.328	84.600	167.928
6	PAMULANG	158.749	159.018	317.767
7	SETU	44.538	43.920	88.458
<b>TOTAL</b>		<b>687.328</b>	<b>689.406</b>	<b>1.376.734</b>

Sumber: <https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/uploads/demografi/KESELURUHAN1662371785401.pdf>.

### Jumlah penduduk di Kota Tangerang Selatan berdasarkan tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN AKHIR	KECAMATAN							JUMLAH PENDUDUK
		SERPONG	SERPONG UTARA	PONDOK AREN	CIPUTAT	CIPUTAT TIMUR	PAMULANG	SETU	
1	TDK/BLM SEKOLAH	29.211	24.114	53.719	42.482	30.111	58.128	18.393	256.158
2	BELUM TAMAT SD	16.469	13.674	26.916	20.305	14.828	31.605	9.459	133.256
3	TAMAT SD	19.703	12.001	29.728	25.584	16.455	30.032	12.318	145.821
4	TAMAT SMP	20.129	15.169	33.569	24.174	17.682	35.537	10.493	156.753
5	TAMAT SMU	42.529	45.578	97.946	71.896	56.986	105.911	23.920	444.766
6	TAMAT DI/2	736	449	1.104	761	559	1.473	322	5.404
7	TAMAT D3	4.875	4.351	9.766	6.213	5.677	10.939	2.430	44.251
8	TAMAT S1	22.085	18.809	34.366	23.424	22.752	40.071	9.818	171.325
9	TAMAT S2	2.806	1.699	3.475	2.219	2.605	3.717	1.126	17.647
10	TAMAT S3	168	80	176	123	273	354	179	1.353
<b>TOTAL</b>		<b>158.711</b>	<b>135.924</b>	<b>290.765</b>	<b>217.181</b>	<b>167.928</b>	<b>317.767</b>	<b>88.458</b>	<b>1.376.734</b>

Sumber: <https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/uploads/demografi/KESELURUHAN1662371785401.pdf>.

#### 4.3.3 Jumlah Pemilih Milenial

Budaya politik partisipan adalah masyarakat dengan budaya partisipan, memiliki orientasi politik yang secara eksplisit ditujukan kepada sistem secara keseluruhan, bahwa terhadap struktur, proses politik dan administratif, tegasnya terhadap input maupun output dari sistem politik itu. Dalam budaya itu seseorang

atau orang lain dianggap sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, memiliki kesadaran terhadap hak serta tanggung jawabnya.

Terkait dengan jumlah milenial yang berpartisipasi dalam pemilu dapat dilihat dari beberapa referensi, salah satunya dari rekapitulasi rumah pemilu pada tahun 2019.

#### **Jumlah Pemilih Milenial di Kota Tangerang Selatan**

<b>USIA</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>TOTAL</b>
<b>UMUR 18</b>	10.489	10.315	20.804
<b>UMUR 19</b>	11.773	10.994	22.767
<b>UMUR 20</b>	11.293	10.884	22.177
<b>UMUR 21</b>	11.821	11.398	23.219
<b>UMUR 22</b>	11.846	11.516	23.362
<b>UMUR 23</b>	10.500	10.068	20.568
<b>UMUR 24</b>	11.137	10.769	21.906
<b>UMUR 25</b>	10.854	11.014	21.868
<b>UMUR 26</b>	11.342	11.570	22.912
<b>UMUR 27</b>	11.745	11.762	23.507
<b>UMUR 28</b>	11.227	11.476	22.703
<b>UMUR 29</b>	10.991	11.338	22.329
<b>UMUR 30</b>	11.202	11.528	22.730
<b>JUMLAH</b>	146.220	144.632	290.852

Sumber: <https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/uploads/demografi/KESELURUHAN1662371785401.pdf>.

Jumlah pemilih milenial didapatkan menggunakan data hasil pemilu yang dilakukan pada tahun 2019. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian lain, terkait dengan jumlah pemilih Pelajar atau Mahasiswa, berdasarkan data pemilih tetap yang diterbitkan oleh KPU di Kota Tangerang Selatan berdasarkan kecamatan yakni sebagai berikut:

Dari jumlah pemilih di atas, terdata sebagai anak muda yang masih berstatus pelajar mencapai 57.379 Jiwa, laki-laki sebanyak 30.356 jiwa dan Perempuan 27.023 jiwa. (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan). Maka dari jumlah hasil perolehan suara sah Partai Golkar di Kota

Tangerang Selatan sebanyak 124.467, maka jumlah suara sah pemuda sekitar 34 % pemuda milenial ikut mempengaruhi suara tersebut.

Hal demikian tergambar jelas saat penulis melakukan wawancara kepada Daffa bahwa keterlibatan anak milenial dapat dinilai signifikan karena adanya beberapa anak muda seusianya yang tergabung, bahkan Daffa sendiri pun ikut serta sebagai partisipan politik tersebut. Berikut keterangannya:

“Saya cukup terlibat dalam Partai Golkar. Karena menurut saya penentuan dalam memilih pemimpin penting dipertimbangkan sebab seluruh aspek kehidupan social masyarakat akan terpengaruhi oleh pemimpin. Maka saya pribadi akan ikut serta dalam study politik, selain untuk mengembangkan pengetahuan pribadi, pun sebagai bentuk upaya saya ikut serta dalam merubahkebijakan-kebijakan pemerintah.”<sup>50</sup>

Hal demikian sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gabriel bahwa Budaya politik merupakan budaya atas dasar norma yang mengatur sikap, dan pola pemikiran psikologis terhadap masyarakat dalam kehidupan. Maka dapat dinilai ketertarikan milenial terhadap budaya politik sangat signifikan.

Pendapat di atas dipertegas dengan keterangan dari Muhammad Jaki bahwa banyak anak muda atau milenial yang terlibat dan bergabung ke dalam Partai Golkar berdasarkan kegiatan-kegiatan social kepemudaan yang diadakannya. Berikut pernyataan Jaki saat diwawancarai:

“Pandangan saya terkait dengan millineal yang tertarik terhadap Partai Gokar, sangat besar. Karena dibuktikan oleh beberapa teman yang tergabung dalam kegiatan kepemudaan, kemudian bergabung ke dalam organisasi politik berupa Sayap Parpol yakni AMPG mencapai 40 hingga 60 orang.”<sup>51</sup>

Hal demikian dapat dipahami bahwa ketertarikan milenial teradap partai Gokar sangat besar sehingga menambah pemahaman bahwa keikut sertaan milenial diperlakukan guna memberikan pemahaman berpolitik untuk bernegara serta mampu menjadi penerus pemimpin di masa mendatang.

---

<sup>50</sup> Daffa Fajriansyah, Sarjana Ilmu Hukum, diwawancarai oleh Rosihan Alam Tarmiji H, pada 12 April 2023, Ciputat Tangerang Selatan.

<sup>51</sup> M. Jaki, Pekerja, Diwawancarai pada 21 Februari 2023, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Pendapat di atas dikuatkan oleh pendapat Andra bahwa ketertarikan milenial pun dirasakan lingkungan sekitarnya dengan adanya kerabat atau kawan yang bergabung dalam Partai Golkar karena kegiatan-kegiatan yang menarik bagi pergerakan dan berdampak bagi masyarakat umum. Demikian penjelasannya saat dilakukan wawancara:

“Menurut saya banyak anak muda yang ikut bergabung dalam Partai Golkar, khususnya di Kota Tangerang Selatan, terlebih kegiatan pergerakan yang diadakan adalah kegiatan kemanusiaan seperti peduli para korban gempa di Cianjur (pada tahun 2022 lalu), pun kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat seperti membersihkan dan menyediakan bak sampah bagi warga, serta memanfaatkan momen keagamaan berbagi takjil dan lain sebagainya.”<sup>52</sup>

Selain itu, budaya politik partisipan dibuktikan dengan pernyataan para esponden terkait dengan karir yang tepat bagi milenial yang peduli terhadap pemerintahan, yakni dengan meniti karir pada Partai Politik adalah upaya individu untuk tetap menjaga hidup dalam kepedulian pemerintahan yang baik. Demikian keterangan dari M. Jaki saat dilakukan wawancara:

“Saya merasa terlibat lebih dalam bahkan mengembangkan karir dalam dunia politik bukan hal yang buruk, bahkan akan sangat tepat bagi milenial guna merubah pemerintahan yang lebih maju, lebih baik lagi sehingga di masa mendatang Indonesia adalah negara yang sesuai dengan Pancasila yakni kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.”<sup>53</sup>

Hal demikian sesuai dengan pendapat dari Daffa bahwa pengembangan karir di dunia politik sangat tepat bagi milenial karena selain politik bernegara ada banyak relasi yang berguna diluar itu, seperti usaha dan lain sebagainya. Demikian keterangannya saat diwawancarai:

“Pengembangan karir di dalam partai politik manapun akan sangat tepat, karena relasi yang terbangun di dalamnya bukan orang-orang biasa. Maka akan sangat baik jika karir dimulai dari politik, sekalipun tidak dapat masuk ditatanan

---

<sup>52</sup> Andra Dwi Setiawan, Sarjana Kesehatan Sosial, diwawancarai pada 30 Februari 2023, Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

<sup>53</sup> M. Jaki, Pekerja, Diwawancarai pada 21 Februari 2023, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

pemerintahan pusat atau daerah, relasi yang ada akan sangat memantu bagi kehidupan di masa mendatang.”<sup>54</sup>

Hal demikian sesuai dengan pendapat dari Daffa saat diwawancarai:

“Partai Golkar adalah partai yang terbuka untuk siapapun dan generasi milenial adalah subjek utama dalam prospek perekrutan anggota guna mengembangkan Partai demi masa depan pemerintahan yang sesuai dengan Undang-undang yang semestinya terkait dengan pemberdayaan masyarakat luas.”<sup>55</sup>

Dengan adanya keterbukaan dari Partai Golkar dalam study politik bagi para milenial, kemudian disambut oleh para milenialis bahwa pendidika politik dan merangkul anak muda adalah Tindakan yang direspon maka dapat dipahami milenialis menganggap bahwa hal demikian penting dilakukan dan sesuai dengan logika milenial sehingga mudah diterima dan menarik para anak muda sebagai penerus kepemimpinan mendatang.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ketertarikan anak muda milenial terhadap study partai politik Golkar dinilai sesuai dengan budaya politik partisipan yang mampu memberi pengaruh positif bagi partai Golkar dan politik di Indonesia.

#### **4.3.4 Upaya DPD Partai Golkar Dalam Meningkatkan Ketertarikan**

Dalam meningkatkan ketertarikan, partai Golkar memberikan wadah dalam uaya memberikan kesempatan milenial untuk mengambil peran, salah satunya dari struktur positioning dalam organisasi. Positioning adalah persepsi suatu pihak menurut pihak lain berdasarkan latar belakang pihak yang dinilai. Definisi Positioning menurut Philip Kotler menyatakan bahwa positioning adalah tindakan merancang produk, dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu diingatan konsumen. (Wasana, 2008: 409).

---

<sup>54</sup> Daffa Fajriansyah, Sarjana Ilmu Hukum, diwawancarai oleh Rosihan Alam Tarmiji H, pada 12 April 2023, Ciputat Tangerang Selatan.

<sup>55</sup> Daffa Fajriansyah, Sarjana Ilmu Hukum, diwawancarai oleh Rosihan Alam Tarmiji H, pada 12 April 2023, Ciputat Tangerang Selatan.

Kesan dalam hal ini yaitu persepsi atau image positif konsumen terhadap perusahaan maupun produk tersebut. Sehingga konsumen akan mengerti dan menghargai apa yang dilakukan perusahaan untuk membedakan diri dengan pesaing lainnya. Perusahaan harus meneliti atau mengidentifikasi posisi pesaing kemudian memutuskan untuk mengambil posisi setaraf atau mencari kesempatan dalam pasar dengan menggunakan strategi yang telah dibangun sebelumnya. Apabila posisi perusahaan dekat dengan pesaing lainnya yang menawarkan produk yang sama, perusahaan harus menyeleksi lalu mencari perbedaan lebih lanjut melalui konsep atau kualitas yang diusung perusahaan tersebut. (Wasana, 2008: 411).

Maknanya adalah mencari posisi yang tepat di dalam pasar setelah menentukan strategi segmentasi yang di pakai. Dengan kata lain positioning adalah suatu tindakan atau langkah-langkah dari perusahaan untuk menempatkan produk di dalam pikiran konsumen sasaran dimana perusahaan tersebut memiliki pembeda atau ciri khas yang dapat diunggulkan dengan pesaing-pesaing lainnya. Dalam proses menjalankan positioning harus diimbangi dengan komunikasi yang baik, hal tersebut dapat berpengaruh juga terhadap citra yang ingin ditanamkan perusahaan kepada konsumen sasaran.<sup>56</sup>

Dalam hal ini positioning kaum milenial menurut Golkar dalam politik di masa mendatang, sebagai perencanaan politik dalam kebijakan masyarakat. Kaum milenial yang termasuk generasi mendatang guna mengembangkan kondisi rakyat Indonesia dalam politik, berdasarkan kebijakan-kebijakan yang memihak untuk rakyat. Maka Golkar memberikan wadah serta jalan menuju keberhasilan yang dicapai, yakni kebijakan undang-undang sesuai kondisi masyarakat secara menyeluruh. Terlebih dalam Sosialisasi Pendidikan Politik Kepada Masyarakat.

Dalam hal ini penulis membagi positioning milenial menurut Golkar ke dalam tiga sub tema, sebagai berikut:

## **1. Fasilitator**

---

<sup>56</sup> Wasana. Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan Implementasi dan. Pengendalian Jilid II. (Jakarta: Erlangga, 2008)

Angkatan Muda Partai Golkar juga memiliki kegiatan sosialisasi pendidikan politik terhadap masyarakat baik laki laki ataupun perempuan. kegiatan tersebut adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan AMPG Kota Tangerang Selatan menjelang Pemilu. Hal demikian dikemukakan oleh responden saat diwawancara:

“Pendidikan politik yang biasa di lakukan oleh organisasi ataupun Lembaga swadaya masyarakat mempunyai manfaat yang cukup besar untuk memahami masyarat umum bahwa politik tidak semata mata sebagai sebuah hal yang di anggap tidak bermartabat karna hanya memperebutkan kekuasaan semata tetapi sebagai suatu cara untuk menggunakan hak politik yang di miliki oleh setiap warga Negara dalam rangka menunjukkan sikap politiknya.”<sup>57</sup>.

Hasil wawancara yang diberikan oleh informan tersebut memberikan keterangan kepada penulis bahwa Organisasi atau Lembaga Swadaya masyarakat sebagai wadah yang ikut aktif dalam perannya mensukseskan suatu pesta demokrasi serta mempunyai peranan yang cukup penting dalam memberikan pandangan politik pada masyarakat awam dalam bentuk sosialisasi.

Melalui kegiatan pendampingan dan sosialisasi ini diharapkan memperoleh seperangkat proses pendewasaan hidup bagi pemilih dalam bermasyarakat, pengambilan keputusan, dan keterlibatan para pemilih dalam mengikuti kebijakan publik melalui pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap dalam mencapai tujuan kesetaraan dan keadilan bersama dalam reasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian di atas juga di dukung oleh pendapat oleh Kartono yang menyatakan bahwa Lembaga swadaya masyarakat sebagai wadah penyalur aspirasi atas hak dan kewajiban warga negara dan kegiatan dari masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Lembaga swadaya masyarakat.<sup>58</sup>

Selain itu, kaum milenial juga dinilai sebagai masyarakat yang dapat berpotensi ikut serta dalam perjuangan politik dengan kemampuan yang berkontribusi dalam perubahan bangsa di masa mendatag. Hal demikian seperti

---

<sup>57</sup> Andra Dwi Setiawan, Sarjana Kesehatan Sosial, diwawancarai pada 30 Februari 2023, Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

<sup>58</sup> Kartini Kartono, *Pendidikan Politik : Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 78.

yang dikemukakan dalam laman atau *website* sebuah wawancara bahwa memperjuangkan kebijakan perundang-undangan.

Menurut anggota Komisi I DPR RI (Dave), Golkar selama ini berupaya keras menggolkan kebijakan yang menjadikan generasi muda sebagai lokomotif. Misalnya Omnibus Law, Desain Besar Olahraga Nasional, serta harmonisasi pajak. Hal demikian dikemukakan dalam sebuah wawancara:

“Seperti Omnibus Law, Desain Besar Olahraga Nasional, lalu juga harmonisasi pajak, tiga hal ini yang berpihak ke generasi muda karena dengan itu memudahkan bagi generasi muda untuk memiliki rumah, mencari pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan, menarik investasi dari luar, transformasi ekonomi digital.” (Merdeka, 2022).

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa Golkar menyediakan wadah bagi para pemuda guna mengontribusikan kompetensi politik sebagai masa depan politik bangsa untuk mengaspirasikan kebijakan sesuai dengan kondisi masyarakat.

## 2. Pembina

Lembaga Swadaya Masyarakat tidak hanya sebagai Fasilitator dalam proses pendidikan politik ke masyarakat luas tetapi juga sebagai Pembina Dari keterangan yang diberikan oleh salah responden yang pernah menjadi anggota AMPG Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa:

“Yang saya ketahui salah satu peran penting LSM dalam pendidikan politik adalah “penyuluhan” di mana kegiatan yang dilakukan adalah Proses komunikasi yang dilakukan oleh fungsionaris/ anggota LSM atau Organisasi dalam rangka memberikan pengetahuan tentang program tentang kegiatan politik baik melalui kegiatan kunjungan rumah, pertemuan perorangan maupun pertemuan kelompok. Kegiatan tersebut dilakukan oleh para penggerak LSM atau Organisasi, dan salah satu organisasi yang komitmen dengan kegiatan itu salah satunya dari Golkar.”<sup>59</sup>

Pendidikan politik tidak hanya mengenalkan calon-calon anggota legislative yang akan bertarung dalam Pemilu. Namun, pendidikan ini juga mengajak masyarakat untuk mengkritisi dan memberikan aspirasi untuk calon-

---

<sup>59</sup> M. Jaki, Pekerja, Diwawancarai pada 21 Februari 2023, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

calon legislative yang terpilih nantinya. Pernyataan ini dipertegas dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada seorang anggota (AMPG) yang ada di Kota Tangerang Selatan sebagai sebuah langkah pembinaan atau dengan kata lain cara yang di anggap elegan dalam menyampaikan sebuah pendapat. Dari hasil penelitian pada paragraph sebelumnya juga dapat di jelaskan bahwa AMPG tentunya juga harus menjadi bahagian penting dari aspek berdemokrasi sebagai mana yang di jelaskan oleh Kartono yang menjelaskan bahwa Lembaga swadaya masyarakat sebagai wadah yang ikut aktif dalam perannya mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Serta dalam hal ini ikut menjaga kedaulatan negara serta menjaga ketertiban sosial.<sup>60</sup>

### **3. Pemilih Kritis**

Pemilih kakarter pemilih yang menentukan piihan dalam politik berlandaskan pada kebijakan dan ideologis yang diperkirakan bahwa kompetensi rekam jejak aktor yang dipilih sesuai dengan problem masyarakat yang hendak dipimpinnya.

Pemilih Kritis Sesuai dengan hasil penelitian terkait strategi pemasaran Airlangga Hartanto dalam branding Golkar. Dalam hal ini anak masuk dalam kategori pemilih yang bersifat kritis, karena pendidikan milenial didominasi mendasari pmikiran kritis dan tidak hanya memprotes namun sudah mengalami kematangan dalam kehidupan sosial. Dalam artian kaum milenial pada masa sekarang bukan hanya memiliki pendidikan yang mumpuni, akan tetapi telah didukung pengetahuan berpolitik bahkan terjun langsung dalam dunia politik, oleh karena itu hal demikian diperlukan bagi Golkar guna memilih calon pemimpin seara ideologi dan kebijakan. hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Tirto (2017) bahwa Pemilih kritis mereka yang yang menjatuhkan pilihannya berdasarkan gabungan kebijakan dan ideologi. Dalam menentukan pilihannya, mereka misalnya akan melihat secara personal mengenai figur serta bagaimana rekam jejak programnya.

---

<sup>60</sup> Kartini Kartono, *Pendidikan Politik : Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 79.

Guna menarik generasi milenial untuk bergabung, berharap dapat menjadi penerus untuk berdaya guna di kehidupan bermasyarakat, sama seperti visi dan mis AMPG. Maka AMPG pun memiliki strategi dalam menyambut semangat muda para generasi milenial.

#### **4.3.5 Gerakan Sosial**

Wadah bagi generasi milenial yang diberikan Pattai Golkar tidak hanya rumor semata, namun demikian salah satu cara menarik pemuda dengan kegiatan pergerakan kemanusiaan salah satunya. Adapun keterangan dari responden yang diwawancarai terkait alasan bergabung dengan AMPG adalah karena pergerakan sosialnya.

“Gerakan social yang memang menjadi salah satu magnet rasa partisipasi sebagai pemuda, banyak kegiatan yang disupport, maka dengan adanya support dari partai oleh karenanya kegiatan yang diusulkan dapat terealisasi, missal adanya bencana gempa di Cianjur 2022 lalu, semua organisasi pasti tergerak, begitupula AMPG, kemudian support untuk bantuan didapat dari titik-titik manapun. Dari kegiatan tersebut dapat menstimulasi pemuda lain yang tergerak untuk andil peran dalam kegiatan tersebut.”<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Andra Dwi Setiawan, Sarjana Kesehatan Sosial, diwawancarai pada 30 Februari 2023, Ciputat, Kota Tangerang Selatan.